

Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur

Fransiska Nurin Nikmah

UIN Sunan Ampel Surabaya | fn.nikmah1908@yahoo.com

Abstract: Globalization Era not only have a beneficial impact, but also have negative impacts, including increasingly sophisticated and growing crime in terms of both quantity and quality. One was from the side of the offender, not only adults, but also children. This paper wants to explain punishment for criminal acts of persecution that the offender were minors in the reviews fiqh jinayah. In the end of the article concluded that the Islamic criminal law sanctions against offender of criminal acts of persecution was sentenced *ta'zīr*, which supposedly is the *qisās* or *ḥadd*. This is because the offender according to fiqh jinayah not minors, because he has reached the age of puberty, which is 16 years and 10 days. This contrasts with the positive law of Indonesia who think actors are still under age, because not yet reached the age of 18 years. *Ta'zīr* given by the judge instead of *qisās* because the victim has forgiven the offender, so that the penalty *qisās* can be eliminated. the punishment of *ta'zīr* is given in order to provide education and guidance to the benefit of the offender in order not to repeat his actions again.

Abstrak: Era Globalisasi bukan hanya menimbulkan dampak positif, akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif, di antaranya semakin canggih dan berkembangnya kejahatan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya dari aspek pelaku, tidak hanya orang dewasa, akan tetapi juga anak. Tulisan ini ingin mengkaji hukuman bagi tindak pidana penganiayaan yang pelakunya adalah anak di bawah umur dalam tinjauan fiqh jinayah. Dalam akhir tulisan disimpulkan bahwa bahwa dalam hukum pidana Islam sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan adalah hukuman *ta'zīr*, yang seharusnya adalah *qisās* atau *ḥadd*. Ini dikarenakan pelaku menurut fikih jinayah bukan anak dibawah umur, karena usianya telah mencapai umur baligh, yaitu 16 tahun 10 hari. Ini

berbeda dengan hukum positif Indonesia yang menganggap pelaku masih dibawah umur, sebab belum mencapai umur 18 tahun. *Ta'zīr* diberikan oleh hakim sebagai ganti dari *qisās* karena korban telah memaafkan pelaku, sehingga hukuman *qisās* dapat dihapuskan. Hukuman *ta'zīr* diberikan dalam rangka memberikan pendidikan dan pengarahan kepada kemaslahatan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Kata kunci: fikih jinayah, anak di bawah umur, *ta'zīr*

A. Pendahuluan

Era Globalisasi yang ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka bukan hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggih dan berkembangnya kejahatan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dan semakin mengglobal. Peristiwa kejahatan di Indonesia korbannya bukan hanya ditujukan kepada orang dewasa tetapi anak juga rawan menjadi korban kejahatan.

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan terjadi dan berkembang dalam kehidupan manusia. Kejahatan bukanlah suatu fitrah yang ada pada manusia. Kejahatan menjadi gambaran lain dari eksistensi kehidupan manusia itu sendiri, kejahatan dapat diartikan sebagai berikut : Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada waktu tertentu; Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja; Perbuatan yang mana diancam dengan hukuman, seperti anti sosial yang sengaja merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan yang mana boleh dihukum oleh negara.¹

¹ Abdul Wahid dan Muh. Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), h. 28.

Kejahatan (*jarīmah*) adalah tindakan yang melanggar perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungan dengan *Rabb-Nya* dengan dirinya sendiri dan dengan manusia yang lain.² Menurut Abdul Qadir Audah istilah *jarīmah* ditafsirkan dengan perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.³ Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, banyak kasus yang sering terjadi dilakukan oleh anak dibawah umur, korbannya pun terkadang masih dibawah umur.

Selama tiga dasawarsa, masalah anak baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan (tindak pidana) dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari Pemerintah. Anak sebagai pelaku kejahatan, melalui berbagai kegiatan ilmiah, sudah sering diusulkan agar Pemerintah menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan anak. Sepuluh tahun yang lalu Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Di samping itu perlunya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan, juga perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku kejahatan. Enam tahun yang lalu Pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dua tahun kemudian lahir juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada tahun 2012 dibuatlah Undang-Undang RI No. 11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴

² Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Thariqul Izaah, 2002), h. 2.

³ Abd al-Qa>dir Awdah, *at-Tahyri>' al-Jina>'iy al-Isla>my*, (Beirut: Da>r al-Kita>b al-'Arabi, tt.), h. 67.

⁴ Agung, "Perlindungan Hukum Anak", dalam <http://www./Skripsi Tesis Hukum> "Perlindungan Hukum Anak", diakses 14/05/2011.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi, konsep itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.⁵

Hukuman dalam istilah Arab sering disebut *'uqūbah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan dari hukuman dalam syariat Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadharatan. Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.⁶

Tujuan yang hendak dicapai dalam penjatuhan sanksi terhadap anak adalah perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak, sehingga dapat dicapai kesejahteraan anak. Tujuan dan dasar pemikiran dari penanganan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial dalam arti bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada dibawah kepentingan masyarakat. Di dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997

⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 12.

⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 111-112.

tentang pengadilan anak tidak secara eksplisit mengatur tujuan pemidanaan, namun secara umum dapat dilihat dalam konsiderannya.⁷

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Adapun unsur-unsur yang dapat digolongkan sebagai perbuatan kejahatan penganiayaan adalah : Melukai, Menyakiti, Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) dan Merusak kesehatan.

Putusan No.380/Pid.B.An/2013/PN.Sda, yang terjadi di Sidoarjo merupakan salah satu kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada anak-anak yang masih dibawah umur. Pelaku dalam kasus tersebut juga masih di bawah umur. Proses pemidanaan terhadap anak yang masih dibawah umur memiliki banyak perbedaan dengan pemidanaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Kasus penganiayaan pada putusan tersebut telah melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”⁸

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, yaitu mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, penulis tertarik untuk

⁷ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 26-27.

⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 109.

mengangkat permasalahan tersebut. Perbedaan usia dalam pidana atau pemberian hukuman tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur menurut undang-undang yang berlaku serta kacamata hukum Islam menjadi alasan dalam penulisan ini, sekaligus pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur.

B. Teori Hukuman dalam Fikih Jiayah

1. Pengertian dan dasar Hukum Hukuman

Hukuman berasal dari bahasa arab *'uqūbah* menurut bahasa berasal dari kata *يُقَابُ (ب - ب)* yang sinonimnya:

(وَجَدَ - يَجِدُ - يَجِدُ - يَجِدُ) artinya mengiringinya dan berjalan dibelakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, lafadz tersebut bisa diambil dari lafadz *جَزَاءُ (ب - ب)* yang sinonimnya *جَزَاءُ (ب - ب)* artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.⁹

Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut:

عَذَابٌ مُّؤَلَّفَةٌ لِّهٖ مُزِقَاءُ لَوْ صِرُّهُ لَ الْجِدِّهِمَا عَلَى تَعَصُّهِ أَيْهِ لَوْ رَ الشَّارِعَ .

Artinya: Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 136.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah syara'.¹⁰

Adapun dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut diantaranya :

د. يلجولہ علیہ السلام ان ذوالکلیف - ؑ = فی الاوفی مضحکہ بمبین المناس -
 دیا لحہ - حق و سلات - تالامیع - وف علی مضحکہ - ن - یدیل اللہ الی - ین -
 ید - ضلہ - ونعہ - ن - یدیل اللہ ع - غم - اشہ - یدید - ید - یلا - حوام - س - اب -



Artinya : Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

2. Tujuan Hukuman

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu *jarīmah* menurut Islam adalah pencegahan (*ar-radd wa al-zahr*), perbaikan dan pengajaran (*al-iṣlāḥ wa al-tahdhīb*). Dengan tujuan tersebut pelaku *jarīmah* diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Adapun tujuan dari pemberian hukuman, yaitu:

a. Pencegahan

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), h. 59.

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarīmah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarīmah*nya atau ia tidak akan terus-menerus melakukan *jarīmah* tersebut. Pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut melakukan *jarīmah*. Sebab dengan begitu ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

b. Perbaikan dan Pengajaran

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarīmah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.

3. Syarat-syarat Hukuman

Terdapat beberapa syarat dari hukuman dalam fikih jinayah, yaitu:

a. Hukuman harus ada dasarnya dari Syara'

Hukuman dianggap mempunyai dasar (*shar'yyah*) apabila ia didasarkan pada sumber-sumber syara', seperti al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' atau undang-undang yang ditetapkan di lembaga yang berwenang.

b. Hukuman harus bersifat pribadi (perorangan)

Hukuman disyaratkan harus bersifat pribadi atau perorangan, artinya bahwa hukuman harus dijatuhkan pada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah.

c. Hukuman harus berlaku umum

4. Macam-macam Hukuman

Dalam fikih jinayah Terdapat berbagai klasifikasi dari hukuman, yaitu:

a. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Maka hukuman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

Hukuman yang ada nashnya, yaitu *ḥudūd*, *qiṣās*, *diyah* dan *kaffārah*; hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zīr*.

- b. Hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat dibedakan menjadi empat, yaitu : Hukuman pokok (*al-'uqūbah al-aṣliyyah*), Hukuman pengganti (*al-'uqūbah al-badaliyyah*), Hukuman tambahan (*al-'uqūbah al-tabā'iyah*), dan Hukuman pelengkap (*al-'uqūbah al-takmīliyyah*).
- c. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi dua, yaitu : Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman *ḥadd*; Hukuman yang memiliki dua batas yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan *ta'zīr*.
- d. Hukuman ditinjau dari sasaran hukum, hukuman dapat dibagi menjadi empat, yaitu : Hukuman badan, Hukuman yang dikenakan dengan hukuman jiwa, Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, dan Hukuman harta.¹¹

Dikalangan fuqaha, *jarīmah-jarīmah* yang belum ditetapkan hukumannya oleh syara' dinamakan dengan *jarīmah ta'zīr*. *Jarīmah ta'zīr* juga dapat dipahami bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *ḥad* dan tidak pula *kaffārah*. Hukuman *ta'zīr* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat melainkan pada awalnya mubah.

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 28-30.

[illegible]

a. Hukuman *ta'zīr* yang mengenai badan, meliputi Hukuman mati dan Hukuman Jilid (Dera).

Al-Qānūn, Vol. 18, No. 1, Juni 2015

Artinya: Telah menceritakan Muslim bin Ibrahim, sesungguhnya Hisyam ad-Dastuwai dan dari ayahnya Yazid, mereka telah bercerita kepada yang artinya dari Yahya, dari Abi Qilabah, dari Abi Muhallab, dari Imran bin Husain r.a bahwa seorang wanita suku Juhainah pernah datang kepada Nabi SAW sedangkan ia dalam keadaan hamil karena berzina, maka ia berkata , 'Ya Nabi Allah, telah sampai kepadaku hukum had, maka lakukanlah atasku had itu. Lantas Nabi memanggil walinya dan beliau berkata, 'Berbuat baiklah kepadanya (jangan dicela-cela), bila ia telah melahirkan anak, bawalah dia kepadaku. 'Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk had; lalu aku tutupkan kainnya ke badannya, kemudian ia memerintahkan (untuk dirajam), lalu dirajamlah perempuan itu. (HR. Muslim)

Suatu hukuman dapat dihapus karena beberapa sebab, yaitu: Pelaku meninggal dunia, Hilangnya anggota badan yang harus dikenai hukuman, Tobat dalam kasus *jarīmah hirabah*, Perdamaian dalam kasus *jarīmah qisās* dan *diyat*, Pemaafan dalam kasus *qisās* dan *diyat* serta

Al-Qānūn, Vol. 18, No. 1, Juni 2015

dalam kasus *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan hak adami, diwarisinya *qīṣāṣ*, kadaluwarsa¹⁵ dan mabuk.¹⁶

Disis lain Gila dan Anak di bawah umur juga menjadi sebab hapusnya suatu hukuman. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi :

عَنْ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : سَيِّئٌ مَلِيقٌ مَالُ الْوَقْفِ لِمَا - م -
عَنْ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ الْمُهْرَ عَنْ بَنِي - حَيْثُ قَتَلُوا - لِمَم -
الْوَهْدِ - ع - ح - وَحْدَهُ قَتَلَ - (رواه أحمد وأبو داود)¹⁷

Artinya : Diriwayatkan dari Ali, bahwa Nabi SAW bersabda : 'Tidaklah dicatat dari tiga hal : dari orang tidur hingga dia bangun, dari anak-anak hingga dia dewasa dan orang gila hingga dia berakal (sembuh). (HR. Abu Dawud).

Para fuqaha sepakat bahwa orang gila tetap bertanggungjawab atas semua perbuatannya secara perdata. Dia harus membayar ganti rugi atas semua kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidananya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang pertanggungjawaban orang gila dalam tindak pidana pembunuhan dan pelukaan. Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa kesengajaan orang gila adalah perbuatan tersalah sebab orang gila itu tidak mungkin berniat melakukan suatu perbuatan pembunuhan atau pelukaan, karena itu apabila perbuatannya tidak diniatkan perbuatan tersebut bukan disengaja melainkan tersalah.

Adapun gila yang sebelum ada putusan hukuman, menurut pendapat Syafi'iyah bahwa pemeriksaan pengadilan tidak dapat menghalangi atau menghentikan pemeriksaan tersebut karena taklif (pembebanan hukum)

¹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, h. 33.

¹⁶ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 82.

¹⁷ Abu Da>wu>d Sulayma>n, *Sunan Abi> Da>wu>d*, h. 139.

hanya disyaratkan pada waktu melakukan tindak pidana. Mazhab Maliki dan Hanafi bahwa keadaan gila sebelum ada putusan hakim menghalangi dan menghentikan pemeriksaan pengadilan sampai keadaan gila itu hilang. Sedangkan keadaan gila sesudah ada putusan hukuman dari hakim, Imam asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa apabila tersangka tersangka menjadi gila setelah ada putusan hukuman, pelaksanaan eksekusi hukuman tidak bisa ditunda kecuali tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana hudud dimana satu-satunya bukti adalah pengakuan terpidana.¹⁸

Hapusnya hukuman yang selanjutnya adalah terhadap anak yang masih dibawah umur. Hukuman bagi anak kecil yang belum mumayyiz adalah hukuman untuk mendidik murni (*ta'dībiyyah khālīṣah*), bukan hukuman pidana. Ini karena anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman. Hukum islam tidak menentukan jenis hukuman yang dijatuhkan kepada anak kecil, tetapi hukum islam memeberikan hak kepada ulil amri untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pandangannya.

Pemberian hak kepada penguasa untuk menentukan hukuman agar ia dapat memilih hukuman yang sesuai bagi anak kecil disetiap waktu dan tempat. Pengusa berhak menjatuhkan hukuman kepada anak dibawah umur berupa memukul anak tersebut, menegur, menyerahkan kepada orang lain, menaruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau menempatkannya di suatu tempat dengan pengwasan khusus.¹⁹ Ketentuan baligh dalam penjatuhan hukuman terhadap anak dibawah umur dimualai sejak usia 7 (tujuh) tahun hingga mencapai kedewasaan (*bāligh*) dan fuqaha' membatasinya dengan usia 15 (lima belas tahun) yaitu masa kemampuan

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, (Bogor: Kharisma Ilmu, tt.), h. 250-253.

¹⁹ *Ibid.*, h. 259.

berpikir lemah (*tamyīz* yang belum baligh). Jika seorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Untuk anak laki-laki yang telah keluar air maninya, baik saat terjaga maupun dalam keadaan tidur sedangkan perempuan dapat diketahui balighnya ketika menstruasi.

C. Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur dalam Tinjauan Fiqh Jinayah

Dalam hukum Islam, hukuman memiliki dua tujuan yaitu: Pencegahan, Perbaikan dan Pengajaran. Dengan adanya dua tujuan hukuman tersebut, hukuman yang diberikan akan memberikan dampak positif kepada pelaku, yaitu dengan terbentuknya moral yang baik, sehingga akan membawa perilaku masyarakat sesuai dengan tuntutan agama. Adapun hukuman terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zīr*. *Ta'zīr* adalah menjatuhkan *ta'zīr* (sanksi disiplin) terhadap dosa-dosa yang didalamnya tidak terdapat hudud.

Hukuman *ta'zīr* bisa diberikan karena ada faktor pemaafan dari korban kepada pelaku sehingga hukuman *qisās* tidak dijatuhkan. Pemaafan dari korban dapat menghapuskan hukuman yang sebenarnya yaitu qishah atau had. Tetapi hakim tetap memberikan hukuman *ta'zīr* sebagai penggantinya. Hukuman *ḥadd* atau *qisās* tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan had kepada pelaku harus sudah baligh. Penerapan hukuman yang relevan atau efektif dalam hukum Islam tentang hukuman terhadap pelaku tersebut adalah hukuman *ta'zīr*, karena di dalam *ta'zīr* itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh dan wajib. Pada saat ini *ta'zīr* adalah hukuman yang diberikan oleh hakim. Maka dalam perkara ini hakim berwenang untuk

menyelesaikan dan memutus perkara berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dalam hukum pidana Islam sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan adalah hukuman *ta'zīr*. Seharusnya hukuman yang diberikan adalah *qisās* atau *had* sebab pelaku bukan anak dibawah umur, karena usianya telah mencapai umur baligh yaitu 16 tahun 10 hari, Namun dalam hukum positif di Indonesia pelaku masih dibawah umur, sebab belum mencapai umur 18 tahun. *Ta'zīr* diberikan oleh hakim sebagai ganti dari *qisās* karena korban telah memaafkan pelaku, sehingga hukuman *qisās* dapat dihapuskan. Hukuman *ta'zīr* diberikan dalam rangka memberikan pendidikan dan pengarahan kepada kemaslahatan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

D. Putusan Pengadilan dan Pertimbangan Hakim dari Pengadilan Negeri Sidoarjo

Putusan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam kasus tersebt adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa N.F tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Terhadap Anak
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan 15 (Lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa : Sebuah roti kalung terbuat dari besi ger dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi, Sebuah baju

seragam sekolah warna putih ada bercak darah koban dikembalikan kepada Saksi I

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500, (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 oleh Surya Yulie Hartanti, SH., MH., sebagai hakim ketua dengan dibantu oleh Syarifuddin, SH., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

sedangkan pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap anak karena memenuhi dua unsur, yaitu :
 - a. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan. Unsur tersebut telah terpenuhi sesuai dengan fakta yang terungkap.
 - b. Terhadap anak. Sesuai dengan pasal 1 UU No. 23 tahun 2002 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Unsur ini juga telah terpenuhi sebab saksi I berusia 14 tahun 10 bulan.
2. Beberapa hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa juga menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku penganiayaan yang masih dibawah umur.
3. Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah:
 - a. Terdakwa mengaku terus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
 - c. Terdakwa masih anak-anak

- d. Terdakwa telah minta maaf dan saksi I telah memaafkan, serta orang tua saksi I telah mencabut laporannya

E. Analisis tentang Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Sidoarjo

Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, majelis hakim harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menyelesaikan kasus pidana No. 380/Pid.B.An/2013/PN.Sda tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur oleh terdakwa N.F, majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjadikan Undang-Undang No 23 tahun 2002 sebagai dasar dalam memberikan putusannya, yakni pada pasal 80 ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).²⁰

Dalam menyelesaikan perkara pidana, Pengadilan Negeri Sidoarjo sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam tuntutan dan putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yang masih dibawah umur dalam kasus penganiayaan ini. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah:

1. Terdakwa mengaku terus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan

²⁰ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, h. 109.

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
3. Terdakwa masih anak-anak, terdakwa berusia 16 tahun 7 bulan
4. Terdakwa telah minta maaf dan saksi I telah memaafkan, serta orang tua saksi I telah mencabut laporannya

Berdasarkan pasal 1 butir 2 UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana atau,
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²¹

Ada dua kategori perilaku anak yang membuat dia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Sementara itu, dalam KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat jelas dalam KUHP di Indonesia bahwa suatu perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur yaitu :

1. Adanya perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum

²¹ Undang-undang Perlindungan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 53.

3. Adanya kesalahan
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.²²

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur telah memenuhi dua unsur, sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu tindak pidana, unsur tersebut yaitu :

1. Melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan
2. Terhadap anak

Dari kedua unsur tersebut kemudian hakim menetapkan hukuman kepada terdakwa yang disesuaikan juga dengan undang-undang yang berlaku serta pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, maka hakim memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan 15 (Lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan.

Ancaman pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada anak, dengan harapan anak tersebut masih dapat dibina untuk diperbaiki budi pekertinya maupun akhlaknya. Sebagai pengganti adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Kemungkinan dapat terjadi bahwa anak yang mendekati umur 17 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun telah ikut dalam kegiatan politik atau tindakan yang berdasarkan keyakinan yang patut dihormati maka terhadap anak tersebut dapat pula dikenakan pidana tutupan. Anak dibawah umur menurut UU No. 23 tahun 2002 adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

²² Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 33-34.

Adapun sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak dapat berupa:

1. Perawatan di rumah sakit jiwa
2. Penyerahan kepada pemerintah
3. Penyerahan kepada seseorang
- i. Sedangkan tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok meliputi :
 4. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya
 5. Penyerahan kepada pemerintah
 6. Penyerahan kepada seseorang
 7. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
 8. Pencabutan surat izin mengemudi
 9. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 10. Perbaikan akibat tindak pidana
 11. Rehabilitasi
 12. Perawatan di lembaga²³

Tindakan penyerahan kepada seseorang dilakukan demi kepentingan anak yang bersangkutan. Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada anak yang bersangkutan. Adapun yang menjadikan pertimbangan hukum hakim adalah suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif maka pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan. Mengingat kenyataan yang terjadi di masyarakat bahwa adanya anak dibawah umur 12 tahun yang melakukan kenakalan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat seperti penganiayaan. Terhadap anak tersebut tetap akan diajukan ke pengadilan anak, namun tidak dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban pidana tetapi lebih ditujukan kepada tanggungjawab orang tua

²³ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak*, h. 222-223.

terhadap anaknya. Atas dasar hal tersebut maka dalam proses pengadilan anak akan melibatkan partisipasi orang tua baik orang tua pelaku maupun korban. Sebab orang tua ikut bertanggungjawab dan sebagai bagian dari pertanggungjawaban tersebut orang tua anak dilibatkan dalam proses pengadilan anak.

F. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi hukum dalam putusan hakim tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur

Dalam hukum pidana Islam, anak di bawah umur khususnya periode *mumayyiz* tidak dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan kemampuan berfikir dan memilih. Dalam penerapan sanksi, Islam sangat mempertimbangkan rasa keadilan, baik secara sosial maupun keadilan secara individual. Disinilah nilai kemanusiaan tercakup. Abu Zahrah berpendapat bahwa kedatangan Islam adalah menegakkan keadilan dan melindungi keutamaan akal budi manusia. Pendapat tersebut juga dijelaskan oleh Ash-Shabuni, bahwa Islam datang dengan membawa kepentingan menuju pada tegaknya keadilan, melindungi kehormatan manusia, mencegah segala bentuk kejahatan, memberi pelajaran pada pelaku tindak kejahatan dengan memberikan sanksi seimbang atas perbuatan yang dilakukannya.

Menurut analisis penulis yang bersumber dari data-data yang terkumpul dapat diketahui bahwa hukuman terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zir*. Penjelasan mengenai *ta'zir* telah dijelaskan secara lengkap pada bab-bab sebelumnya. *Ta'zir* adalah menjatuhkan *ta'zir* (sanksi disiplin) terhadap dosa-dosa yang didalamnya tidak terdapat hudud.

Perbedaan umur dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sangatlah berbeda jauh dalam hal

penjatuhan hukuman. Dalam hukum Islam usia baligh dibatasi minimal umur 15 tahun, sedangkan dalam hukum positif di Indonesia adalah 18 tahun. Dari sini bertolak belakang mengenai hukuman yang pantas diberikan oleh pelaku pada tindak pidana penganiayaan tersebut. Seharusnya jika dilihat dari usia pelaku, maka pelaku haruslah dihukum *qishah* atau *had*. Sebab faktor Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan telah terpenuhi dan juga penganiayaan tersebut tergolong *Asy-Syajjaj* artinya Luka di kepala dan wajah, adapun luka pada anggota tubuh yang lain selain kepala dan wajah disebut jarah, dan orang yang membedakan antara luka di kepala dan luka di lain kepala. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja, seperti dahi. Sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk *syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan muka secara mutlak. Adapun organ-organ tubuh termasuk kelompok anggota badan, meskipun ada pada bagian muka, seperti mata, telinga dan lain-lain tidak termasuk *syajjaj*.

Hukuman *tā'zir* bisa diberikan karena ada faktor pemaafan dari korban kepada pelaku sehingga hukuman *qishas* tidak dijatuhkan. Pemaafan dari korban dapat menghapuskan hukuman yang sebenarnya yaitu *qishah* atau *had*. Tetapi hakim tetap memberikan hukuman *tā'zir* sebagai penggantinya. Hukuman *had* atau *Qishas* tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan *had* kepada pelaku harus sudah baligh. Penerapan hukuman yang relevan atau efektif dalam hukum Islam tentang hukuman terhadap pelaku tersebut adalah hukuman *tā'zir*, karena di dalam *tā'zir* itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh dan wajib.

Pada saat ini *tā'zir* adalah hukuman yang diberikan oleh hakim. Maka dalam perkara ini hakim berwenang

untuk menyelesaikan dan memutus perkara berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan surat al-Maidah ayat 49 :

وَأَحْذَرُوا فِيهِمْ أَن يُهْمُوا بِهِمْ وَلَا تَجْرَعُوا لَهُمْ رَهْوًا ۖ
 أَيْدِيكُمْ مِنْهُ وَلَكُمْ بُرَأءٌ إِلَى اللَّهِ ۖ فَمَا تَعْبُدُوا لَدُنْكُمْ
 يُدْرِكُ الْوَعْدَ لِلَّهِ فِيهِمْ ۚ هَذِهِ حُجَّتُهُمْ إِيَّاكُمْ ۖ
 لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ السَّبْعَةِ فَلَنْ لِي بِكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ

Artinya : Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Dalam hukum Islam, hukuman memiliki dua tujuan yaitu: Pencegahan, Perbaikan dan Pengajaran. Dengan adanya dua tujuan hukuman tersebut, hukuman yang diberikan akan memberikan dampak positif kepada pelaku, yaitu dengan terbentuknya moral yang baik, sehingga akan membawa perilaku masyarakat sesuai dengan tuntutan agama.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pertimbangan hukum hakim sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan hukuman bagi pelaku tersebut cukup bersifat mendidik dan mencegah, dan tidak dibenarkan memberikan hukuman had atau hukuman berat. Terbukti bahwa hukuman yang diterima pelaku adalah pidana penjara selama 2 (Dua) bulan 15 (Lima

belas) hari dan pidana denda sebesar Rp.200.000, (Dua ratus Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan.

G. Penutup

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pidana Islam sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan adalah hukuman *ta'zīr*. Seharusnya hukuman yang diberikan adalah *qisās* atau *had* sebab pelaku bukan anak dibawah umur, karena usianya telah mencapai umur baligh yaitu 16 tahun 10 hari, Namun dalam hukum positif di Indonesia pelaku masih dibawah umur, sebab belum mencapai umur 18 tahun. *Ta'zīr* diberikan oleh hakim sebagai ganti dari *qisās* karena korban telah memaafkan pelaku, sehingga hukuman *qisās* dapat dihapuskan. Hukuman *ta'zīr* diberikan dalam rangka memberikan pendidikan dan pengarahan kepada kemaslahatan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Daftar Pustaka

- A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Abd al-Qādir Awdah. *at-Tahyrī' al-Jinā'iy al-Islāmy*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, tt..
- Abdul Qadir Audah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III. Bogor: Kharisma Ilmu, tt..
- Abdul Wahid dan Muh. Irfan. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Abdurrahman Al-Maliki. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Bogor: Thariqul Izaah, 2002.

- Abu Dāwūd Sulaymān. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Maktabah 'Asriyyah, tt..
- Agung. "Perlindungan Hukum Anak", dalam <http://www./Skripsi Tesis Hukum> "Perlindungan Hukum Anak", diakses 14/05/2011.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Makhrus Munajat. *Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mustofa Hasan. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Nandang Sambas. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Undang-undang Perlindungan Anak. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.